

Nama : Eka Arinda

NPM : 2213031080

Kelas C Pendidikan Ekonomi 2022

EKONOMI INDUSTRI

Case Studi Pertemuan 12

Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam, termasuk nikel, batu bara, kelapa sawit, dan karet. Namun, selama puluhan tahun, Indonesia lebih banyak berperan sebagai eksportir bahan mentah dalam Global Value Chains (GVCs). Contohnya, Indonesia mengekspor bijih nikel ke negara lain, yang kemudian mengolahnya menjadi baterai kendaraan listrik dan menjualnya dengan nilai tambah yang tinggi.

Pemerintah Indonesia kini berusaha mengubah posisi dalam GVC, dari pemasok bahan mentah menjadi produsen barang setengah jadi atau jadi, lewat kebijakan hilirisasi industri, larangan ekspor bahan mentah, dan pemberian insentif investasi dalam pengolahan lokal. Namun, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, baik dari pelaku industri dalam negeri maupun negara mitra dagang seperti Uni Eropa, yang bahkan menggugat Indonesia ke WTO.

Pertanyaan:

1. Analisis Konteks:
 - a. Apa saja kelebihan dan kekurangan posisi Indonesia dalam GVC saat ini?
 - b. Mengapa Indonesia belum berhasil mendapatkan nilai tambah yang optimal dalam GVC?
2. Evaluasi Kebijakan:
 - a. Apakah kebijakan hilirisasi seperti larangan ekspor bijih nikel dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC? Jelaskan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan geopolitik.
 - b. Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap hubungan Indonesia dengan negara mitra dagang?
3. Sintesis dan Solusi:

Jika Anda adalah penasihat ekonomi pemerintah, strategi apa yang akan Anda usulkan agar Indonesia mendapatkan nilai tambah lebih besar dalam GVC tanpa merusak hubungan dagang internasional?

Jawab

1. Analisis Konteks

a. Kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam GVC saat ini

Dari referensi yang saya baca, dan hasil analisis kelebihan saat ini dalam GVC adalah Indonesia duduk pada aset strategis seperti cadangan sumber daya mineral (nikel), komoditas agraris (kelapa sawit, karet), dan pasar domestik yang besar. Posisi ini memberi leverage untuk menarik investasi downstream (pengolahan) dan peluang untuk membangun industri hilir berorientasi ekspor. Selain itu, pengalaman rantai pasok komoditas telah menumbuhkan sejumlah klaster industri dan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah tertentu.

Namun ada beberapa kekurangan Indonesia saat ini dalam posisi GVC salah satunya adalah Indonesia sebagai pemasok bahan mentah membawa beberapa kelemahan struktural. Pertama, *low value capture*: sebagian besar nilai tambah diciptakan di tahap pengolahan dan branding di negara lain, sehingga penerimaan devisa relatif kecil per unit komoditas. Kedua, risiko *ketergantungan komoditas* dan volatilitas harga internasional membuat penerimaan negara dan investasi jangka panjang menjadi rentan. Ketiga, kelemahan dalam *absorptive capacity* yaitu kemampuan industri lokal untuk menyerap teknologi, standar kualitas, dan manajemen rantai pasok membatasi kemampuan Indonesia untuk naik tingkat dalam GVC. Konsep upgrading GVC menegaskan bahwa partisipasi saja tidak cukup; negara perlu strategi untuk *process, product, functional*, atau *chain upgrading* agar menangkap lebih banyak nilai (kajian teoretis & empiris terkait upgrading menggarisbawahi hal ini).

b. Penyebab Indonesia belum berhasil mendapat nilai tambah optimal dalam GVC

Salah satunya Adalah posisi tugas dalam GVC rendah nilai tambah. Banyak aktivitas domestik terfokus pada ekstraksi dan pengapalan bahan mentah; aktivitas dengan nilai tambah tinggi (R&D, desain, branding, manufaktur komponen presisi) masih didominasi oleh perusahaan di negara maju. GVC literature menunjukkan bahwa posisi fungsional menentukan peluang nilai yang bisa diambil. Selain itu, keterbatasan kapabilitas domestik juga menjadi penyebab Indonesia belum berhasil mendapat nilai tambah optimal dalam GVC. Kapabilitas teknis, kualitas manajemen, dan kapasitas R&D lokal relatif lemah sehingga sulit memenuhi syarat pemasok global (sertifikasi, standar lingkungan, konsistensi kualitas). Tanpa kapabilitas ini, investor asing cenderung menggunakan tenaga kerja lokal hanya untuk tahap berteknologi rendah.

Selanjutnya, masalah institusional dan infrastruktur. Biaya logistik, energi, serta kompleksitas regulasi meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing untuk kegiatan manufaktur hilir dibanding negara pesaing. Investasi publik belum cukup

diarahkan untuk membangun ekosistem manufaktur berkelas dunia. Serta *rent-seeking* dan pengelolaan pendapatan sumber daya. Bila pendapatan dari ekspor bahan mentah tidak dikelola untuk investasi produktif (infrastruktur, pendidikan, R&D), negara gagal menggunakan rents untuk mendorong industrialisasi fenomena yang dikenal di literatur sebagai potensi *resource curse* jika tidak diatasi. Maka dapat disimpulkan bahwa tanpa perubahan pada posisi fungsional dalam rantai nilai, peningkatan kapabilitas, dan perbaikan institusi/infrastruktur, Indonesia sulit menggeser pemasukan ekonomi dari sekadar volume komoditas menuju nilai tambah tinggi.

2. Evaluasi Kebijakan:

a. Apakah larangan ekspor bijih nikel dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC? Jelaskan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan geopolitik.

Adapun potensi manfaat dalam sudut pandang ekonomi yakni secara teori kebijakan yang memaksa pemrosesan local seperti larangan ekspor bijih nikel dapat mendorong munculnya fasilitas pengolahan (smelter, pabrik pemurnian), menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan share nilai tambah domestik (proses & produk setengah jadi seperti nikel pig iron atau bahan baku baterai). Jika diikuti transfer teknologi dan pembentukan rantai pasok lokal, negara bisa melakukan *upgrading* fungsi (dari ekstraksi ke pemrosesan dan, idealnya, ke manufaktur komponen baterai). Studi-studi kebijakan menunjukkan bahwa proteksi sementara dan persyaratan lokal bisa membantu membangun kapasitas awal bila disertai strategi pembelajaran dan insentif terarah.

Ada beberapa risiko yang muncul dari sudut pandang ekonomi seperti larangan ekspor tanpa kesiapan domestik berisiko menimbulkan distorsi. Jika kapasitas pemrosesan lokal belum cukup seperti modal, teknologi, pasokan energi maka larangan akan menurunkan penerimaan ekspor dan mengurangi kepercayaan investor asing. Selain itu, pelaku industri global bisa mengalihkan investasi ke negara lain (investor mencari rantai pasok yang lebih stabil/terbuka), sehingga efek jangka panjang terhadap industrialisasi tidak pasti.

Adapun dalam Dimensi geopolitik, langkah yang diambil seperti larangan ekspor bersifat proteksionis dan mudah memicu reaksi mitra dagang yang bisa mengambil langkah hukum (WTO), tarif balasan, atau diversifikasi pasokan. Dalam kasus nikel, Uni Eropa sudah melayangkan sengketa ke WTO terkait pembatasan bahan mentah Indonesia; ini menunjukkan risiko pembalasan politik-dagang yang bisa membatasi akses pasar untuk produk hilir Indonesia meski sudah naik nilai tambah. Di sisi lain, di era persaingan geopolitik, kebijakan hilirisasi juga bisa dimanfaatkan sebagai leverage,

negara bisa menarik investor strategis dengan persyaratan investasi jangka panjang. Tetapi hal ini memerlukan diplomasi ekonomi yang hati-hati untuk mengelola dampak multilateral.

b. Dampak pada hubungan Indonesia dengan negara mitra dagang

Menurut saya, larangan ekspor dan kebijakan lokal-*content* akan menimbulkan ketegangan perdagangan. Mitra dagang yang mengandalkan bahan baku mungkin menuntut pembukaan akses atau mengajukan gugatan WTO (sepaimana terjadi). Dampak lain seperti percepatan strategi diversifikasi pasokan di pihak importir (mereka mencari negara alternatif), penurunan investasi asing jangka pendek, dan potensi hambatan perdagangan non-tarif (standar lingkungan/produk) yang menghambat ekspor barang hilir Indonesia. Namun jika kebijakan ditempatkan dalam kerangka transisi yang jelas, disertai dialog bilateral, perjanjian investasi yang memberi jaminan, dan kepastian hukum, hubungan dagang dapat dikelola artinya dampak negatif tidak bersifat tak terelakkan, tetapi memerlukan pengelolaan diplomatik dan kepastian kebijakan domestik.

3. Sintesis dan Solusi:

Jika saya sebagai penasihat ekonomi pemerintah, strategi utama yang saya usulkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam *Global Value Chains (GVCs)* adalah membangun pendekatan yang inklusif, bertahap, dan berbasis kerja sama strategis internasional. Intinya, Indonesia harus mampu memperkuat industri dalam negerinya dan meningkatkan nilai tambah produk ekspor, namun tetap menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan dengan mitra luar negeri. Kebijakan hilirisasi memang penting, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan dengan desain kebijakan yang lebih fleksibel, berbasis insentif, dan tidak menimbulkan ketegangan geopolitik.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menerapkan kebijakan hilirisasi bertahap (*phased downstreaming policy*). Dengan melakukan larangan ekspor bahan mentah secara total dan tiba-tiba, pemerintah sebaiknya menyusun *roadmap* transisi yang jelas dan terukur. Misalnya, dalam lima tahun pertama, fokus diarahkan pada pengembangan kapasitas smelter, penyediaan energi yang memadai, serta transfer teknologi dari investor asing. Setelah kapasitas domestik siap, barulah pembatasan ekspor diberlakukan secara progresif. Pendekatan bertahap seperti ini tidak hanya memberikan waktu adaptasi bagi pelaku industri nasional, tetapi juga mengurangi potensi konflik dengan mitra dagang seperti Uni Eropa, yang selama ini menggugat Indonesia melalui WTO atas kebijakan larangan ekspor bijih

nikel. Dengan demikian, Indonesia tetap dapat menjalankan industrialisasi tanpa dianggap melakukan proteksionisme ekstrem.

Langkah kedua adalah memperkuat strategi insentif investasi berbasis kinerja (*performance-based incentives*). Pemerintah dapat menawarkan fasilitas fiskal, seperti pengurangan pajak, pembebasan bea impor alat produksi, atau keringanan tarif energi, namun dengan syarat jelas: investor harus melakukan *technology transfer*, melibatkan pemasok lokal (*local supplier integration*), dan memenuhi target *local content*. Skema seperti ini mendorong perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia untuk tidak sekadar mengekstraksi sumber daya, tetapi juga membangun rantai pasok dan kapabilitas industri nasional. Model seperti ini telah berhasil diterapkan di negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Malaysia, di mana insentif selektif digunakan sebagai alat negosiasi untuk menarik investasi berkualitas tinggi dan mendorong *functional upgrading* di dalam negeri.

Selanjutnya, Indonesia perlu membangun program pengembangan kapabilitas industri dan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan daya saing jangka panjang. Transformasi posisi dalam GVC tidak akan terjadi tanpa tenaga kerja terampil dan perusahaan lokal yang kompeten. Pemerintah dapat meluncurkan *Supplier Development Program* yang memberikan pendampingan teknis, pelatihan mutu, sertifikasi internasional, dan akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah yang menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Bersamaan dengan itu, perlu ada reformasi sistem pendidikan vokasi yang menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri pengolahan dan manufaktur modern. Peningkatan kualitas SDM menjadi pondasi penting agar kebijakan hilirisasi tidak hanya bergantung pada investasi asing, tetapi mampu melahirkan kapasitas domestik yang mandiri.

Dari sisi hubungan internasional, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepatuhan terhadap aturan perdagangan global. Larangan ekspor yang bersifat kaku dan sepihak sering kali dipandang sebagai bentuk proteksionisme oleh mitra dagang, sehingga memicu gugatan ke WTO dan merusak reputasi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, strategi yang lebih diplomatis adalah mengganti kebijakan larangan total dengan mekanisme negosiasi bilateral dan kontrak jangka panjang (*long-term supply agreements*). Melalui mekanisme ini, Indonesia tetap dapat menjual sebagian bahan mentah dengan nilai ekonomi tinggi sambil memastikan sebagian besar diekspor dalam bentuk produk olahan. Pendekatan ini menampilkan Indonesia bukan sebagai negara penutup pasar, tetapi sebagai mitra strategis yang bertransisi menuju industrialisasi berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia harus memperkuat posisi dalam rantai nilai global dengan menerapkan standar keberlanjutan dan sertifikasi lingkungan internasional. Saat ini, banyak pasar utama dunia, seperti Uni Eropa dan Jepang, mensyaratkan sertifikasi rendah karbon dan *traceability* dalam impor produk industri. Dengan mengadopsi *green standards*, Indonesia tidak hanya akan meningkatkan daya saing ekspornya, tetapi juga mengubah citra sebagai negara produsen bahan mentah menjadi produsen industri hijau yang inovatif. Penerapan *green supply chain management* juga bisa membuka peluang akses pasar baru serta mengurangi resistensi politik dan ekonomi dari mitra dagang yang menentang kebijakan hilirisasi konvensional.

Langkah terakhir adalah menciptakan kemitraan riset dan inovasi internasional untuk memperkuat ekosistem teknologi nasional. Pemerintah dapat membentuk *Industrial Innovation Fund* yang mendukung kolaborasi riset antara universitas, lembaga penelitian, dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Fokus riset diarahkan pada teknologi pemrosesan mineral, energi bersih, dan material baterai. Dengan cara ini, Indonesia tidak hanya menjadi basis produksi, tetapi juga pusat pengembangan teknologi baru yang berperan strategis dalam rantai nilai global kendaraan listrik dan energi terbarukan.